

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**INOVASI DINAS PARIWISATA KOTA DUMAI DALAM PENGEMBANGAN**

**OBJEK PARIWISATA DI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**HOBRI ANGHISTNA ARVAN**

**177310702**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Hobri Anghistna Arvan  
NPM : 177310702  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan  
Objek Pariwisata Di Kota Dumai

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 24 juni 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

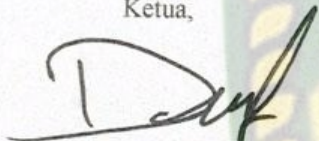
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hobri Anghistna Arvan  
NPM : 177310702  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan  
Objek Pariwisata Di Kota Dumai.


Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

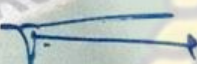
Ketua,

  
Dita Fisdian Adni S.IP., M.IP

Sekretaris,

  
Sylvina Rusadi, S.sos., M.Si

Anggota,

  
Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

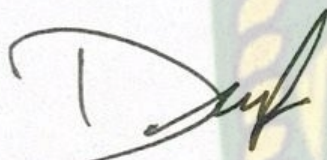
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hobri Anghistna Arvan  
NPM : 177310702  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan  
Objek Pariwisata Di Kota Dumai

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 agustus 2021  
An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

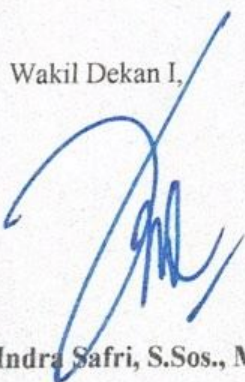


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP



Sylvina Rusadi, S.sos., M.si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,  


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,  


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


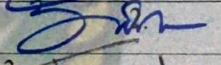
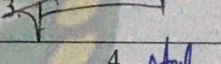
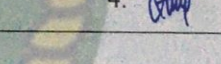
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1166 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hobri Anghistna Arvan  
NPM : 177310702  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai dalam Pengembangan Objek wisata Pariwisata di Kota Dumai.**

Nilai Ujian : Angka : " **00.3** " ; Huruf : " **B+** "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Juli 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai”** ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengalaman. Akan tetapi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bar per bab skripsi ini dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memperbaiki hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, dari awal hingga terwujudnya naskah skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materi. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku pimpinan Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di program studi yang beliau pimpin.
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang sudah beliau arahkan.
5. Kepada kedua orang tua dan adik yang sangat saya sayangi yaitu ayahanda Tovani, Ibunda tercinta Arlinawati S.Pd dan adik Nahara Hari Sakti serta kerabat yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti kepada saya baik secara moril dan materil untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa kebaikan kepada kalian.
6. Seluruh Dosen program studi ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan, yang menambah wawasan menjadi luas dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.

7. Seluruh Staff, Karyawan/ti, Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian naskah skripsi ini.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan Rayes Brimarsyah Rachman S.IP, Yanella Farhaini S.IP, Anwar Bangun S.IP , Riski Ardhi Kurnia, Rahmat Pedro Iswanto, Muhammad Zaki, Fahrul Hidayat, Endah Eka Syahputri, Fikri Ardana, Muhammad Anas, Muhammad Habibi, Ryco Prayuda yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan naskah skripsi ini.
9. Teman-teman yang berada di luar lingkungan Universitas Islam Riau yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan naskah skripsi ini.
10. Dan kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Demikian Usulan Penelitian ini di tulis dan tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyaknya kekurangan. Penulis mohon kritik dan saran guna penyempurnaan kedepan dan diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Hobri Anghistna Arvan

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hobri Anghistna Arvan  
NPM : 177310702  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1).  
Judul Skripsi : Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2021  
Pelaku Pernyataan,



Hobri Anghistna Arvan

# INOVASI DINAS PARIWISATA KOTA DUMAI DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA DI KOTA DUMAI

## ABSTRAK

Oleh

Hobri Anghistna Arvan

177310702

Objek wisata pantai puak ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar dan masyarakat di luar daerah tersebut. Potensi pengembangan salah satu destinasi wisata ini sangat besar karena terdapat keindahan pantai nya. Inovasi dinas pariwisata kota dumai dalam pengembangan objek wisata pantai puak. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas pariwisata kota dumai dalam inovasi pengembangan objek wisata pantai puak dan mengetahui faktor penghambat dinas pariwisata kota dumai dalam melakukan pengembangan objek wisata pantai puak, dan apa saja kendala dalam pengembangan objek wisata pantai puak. Metode dalam penelitian ini menggunakan teori rogers (1995), tipe kualitatif dengan metode deskriptif , yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data serta melakukan observasi dan dokumentasi, dan menggunakan Teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwasan nya inovasi dinas pariwisata kota dumai dalam pengembangan objek pariwisata kota dumai dalam pengembangan objek wisata pantai puak ini dapat dikatakan kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari 5 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu *relative advantage*, *compability*, *complexity*, *trialbility*, dan *observability*. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu, permasalahan anggaran untuk melakukan pengembangan objek wisata pantai puak, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan sadar wisata. Dengan penelitian ini, semoga pemerintah daerah kota dumai dan masyarakat bisa Bersama-sama bekerja sama dalam pengembangan wisata pantai puak.

**Kata kunci : inovasi,dinas pariwisata,pengembangan,pariwisata**

# **INNOVATION OF DUMAI TOURISM DEPARTMENT IN DEVELOPMENT OF TOURISM OBJECTS IN DUMAI CITY**

## **ABSTRACT**

By

Hobri Anghistna Arvan

177310702

*This puak beach tourism object has long been known by the surrounding community and people outside the area. The potential for developing one of these tourist destinations is very large because of the beauty of its beaches. The innovation of the Dumai City Tourism Office in the development of Puak Beach tourism objects. This study aims to find out how the role of the Dumai City Tourism Office in the innovation of developing Puak Beach tourism objects and to find out the inhibiting factors for the Dumai City Tourism Office in developing Puak Beach Tourism Objects, and what are the obstacles in developing Puak Beach Tourism Objects. The method in this study uses Rogers theory (1995), qualitative type with descriptive method, which prioritizes the interview list as a data collection tool and conducts observation and documentation, and uses snowball sampling technique. The results of the study show that the innovation of the Dumai City Tourism Office in developing the Dumai City tourism object in developing the Puak Beach tourist attraction can be said to be less than optimal, this can be seen from the 5 indicators that the author has set, namely relative advantage, compability, complexity, trialbility, and observability. The inhibiting factors in implementing this policy are budget problems for developing puak beach tourism objects, and the lack of public awareness of tourism awareness. With this research, hopefully the local government of Dumai city and the community can work together in developing puak beach tourism.*

**Keywords: innovation, tourism office, development, tourism**





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional. Dalam konteks sistem negara republik indonesia yang membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan rendah adalah desa atau kelurahan.

Di Indonesia pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan yang lainnya. Sementara urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, misalnya kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian dan yang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk Pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 di sebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi di bagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susun lah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-undang 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat di ringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*) pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan

keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya 4 (empat) yaitu:

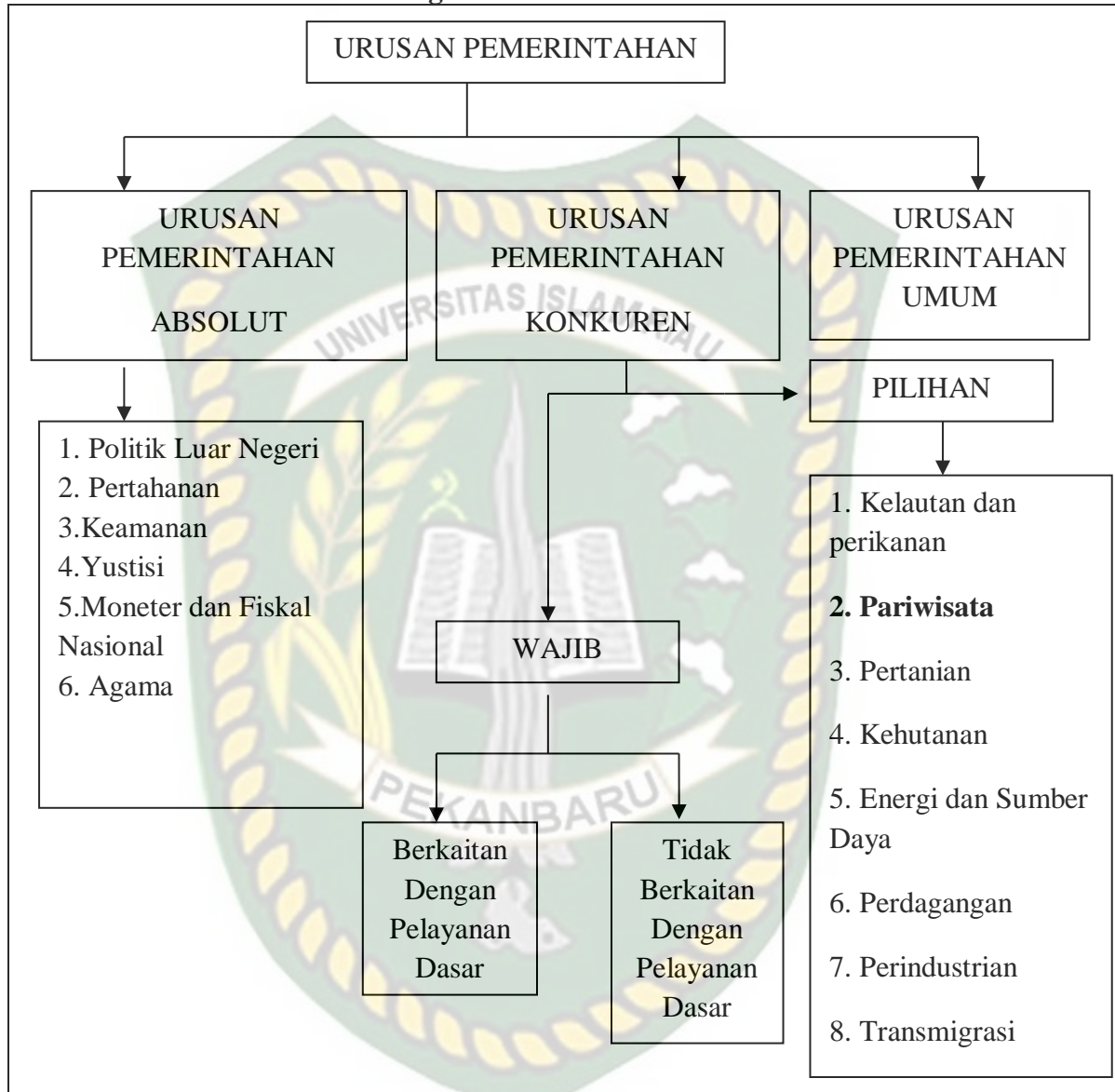
- a. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan di pusatkan di pemerintahan pusat.
- b. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
- c. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- d. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari penjelasan di atas pelaksanaan menggunakan asas desentralisasi, karena memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangga nya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, maka di keluarkanlah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pusat, ada sub urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan ada sub urusan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

**Gambar I.1**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan**



Sumber : Undang-Undang No 23 tahun 2014 (Olahan Penulis)

Dari sejumlah urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pariwisata. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Kegiatan dibidang pariwisata

merupakan kegiatan yang bersifat kompleks meliputi berbagai sektor dan bentuk kegiatan yang memiliki elemen-elemen yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi dan sumber pendapatan daerah. Ciri inovasi daerah yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan maupun kualitas menjadi bermakna dimata publik. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan makmur. keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, Dan pembangunan. Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana tersebut diatas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Inovasi harus dilakukan dalam bidang pariwisata agar menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah, agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan didaerah. Oleh karena itu daerah perlu menyusun visi, misi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah semakin terarah sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah. Dalam pengembangan potensi pariwisata daerah diharapkan

mampu melakukan inovasi melalui penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata.

Kota Dumai memiliki potensi di sektor pariwisata, berikut disajikan dalam tabel objek wisata yang ada di kota Dumai :

Tabel I.1 Daftar Objek Wisata di Kota Dumai

No.	OBJEK WISATA	LOKASI
1.	Pantai purnama	Purnama, Dumai Barat, Kota Dumai
2.	Pantai Teluk Makmur	Tlk.Makmur, Medang Kampai Kota Dumai
3.	Taman Bukit Gelanggang	Tlk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai
4.	Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno hatta, Kota Dumai
5.	Hutan Wisata	Bukit Timah, Dumai Barat, Kota Dumai
6.	Hutan Mangrove	Jl.Nelayan laut, Kota Dumai
7.	Taman Telaga Tirta	Bukit Datuk, Perum Pertamina, Kota Dumai
8.	Bandar Bakau	Jl. Nelayan Laut, Kota Dumai
9.	Pantai Marina Indah Puak	Kec. Medang Kampai, Kota Dumai

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Dumai tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, penulis memfokuskan pada objek wisata pantai marina indah puak Kota Dumai karena memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pariwisata. Kota Dumai memiliki salah satu sector pariwisata yang cukup menarik untuk di datangi oleh wisatawan yaitu Pantai Marina Indah Puak. Pantai Marina Indah Puak teluk Makmur

yang lebih dikenal dengan pantai puak marina dan berada di jalan Arifin ahmad, teluk Makmur medang kampai, Dumai sudah di Kelola sejak tahun 2014 oleh sekeolmpok sadar wisata (Pokdarwis).

Keberadaan pantai itu berada di tanah pemerintah kota (Pemko) Dumai seluas 42 hektar. Namun saat ini baru di Kelola seko hektar. Sebelum dibuat pantai oleh Pokdarwis yang diketuai oleh Erudi Kawasan itu hanya di penuh semak dan pohon-pohon kayu besar. Melihat terbengkalainya lahan seluas 42 hektar setelah di ganti rugi oleh pemerintah muncul keinginan Erudi beserta anggotanya untuk mengelola Pantai Puak Marina tersebut.

Dari praobservasi awal yang dilakukan oleh penulis setelah memasuki objek wisata tersebut, fasilitas dan sarana pra sarana yang ada di Pantai Marina Indah Puak banyak terdapat nya fasilitas yang tidak terawat menyebabkan gazebo maupun pondok-pondok yang telah dibuat sudah ada yang lapuk, serta terdapat rumput-rumput di sekitaran objek wisata yang sudah mulai Panjang dan semak, dan terjadinya karatan pada fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Marina Indah Puak tersebut, akses jalan menuju pantai tidak terawat, terdapatnya sampah yang berserakan dan membuat area di sekitar pantai menjadi tidak bersih dan kotor dan jika ada wisatawan yang datang berkunjung, sangat terganggu dan merasa tidak nyaman ketika menggunakan fasilitas yang ada di Pantai tersebut. Melihat permasalahan yang telah djelaskan di atas membuat kurangnya minat dan ketertarikan pengunjung sangat kurang untuk berwisata ke Pantai Marina Indah Puak tersebut di karenakan kenyamanan bagi seorang pengujung.

Untuk itu tentunya adanya suatu inovasi untuk mengembalikan atau menambah daya tarik dari Panatai Marina Indah Puak sebagai sebuah objek wisata. Dalam peraturan menteri pariwisata Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Dumai akan melakukan berupa inovasi yaitu Menyusun konsep dan rencana kerja serta melakukan pembangunan fisik dan perbaikan sarana prasarana di objek wisata tersebut.

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Dumai sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan maka dari itu peran pemerintah kota dumai sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada dan yang belum tergal. Pemerintah kota harus turut melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bersama-sama sebagai penggerak untuk lebih mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah kota dumai menggaet masyarakat dan pihak swasta (agent travel dan hotel) dalam pengembangan pariwisata Kota Dumai. Hal ini dilakukan karena pelaku pariwisata tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat dan pihak swasta.

Dalam pengembangan Pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut

Charles Kaiser Jr. dan Lrry E. Helber dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu di mulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itu dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang ditentukan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu di lakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Dari uraian diatas perlu disadari oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu objek wisata mengingatkan bahwa objek wisata Pantai Marina Indah Puak adalah salah satu objek wisata yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan pendapatan daerah dengan letak strategisnya di tengah kota. Solusi-solusi yang dimaksud dalam hal ini adalah inovasi terkait dengan pengembangan kawasan objek wisata Pantai Marina Indah Puak ini. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Dumai dapat mengambil langkah yang strategis dari pilihan yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa fenomena yang penulis jumpai di lapangan :

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pariwisata terhadap pengawasan objek wisata yang ada di Kota Dumai tepatnya di Pantai Marina Indah Puak Kota Dumai.
2. Kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur yang ada pada objek wisata di Kota Dumai.
3. Kurangnya pembaharuan fasilitas yang ada di objek wisata Kota Dumai sehingga berpengaruh pada minat masyarakat yang ingin berkunjung ke objek wisata khususnya di Pantai Marina Indah Puak Kota Dumai.

Menyikapi permasalahan yang telah disebutkan diatas maka sudah seharusnya dinas pariwisata Kota Dumai mengambil langkah yang tepat agar pengembangan pariwisata dapat terimplementasikan dengan baik dan berhasil memenuhi kepuasan pengunjung, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pengembangan pariwisata telah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pariwisata. Selain itu bila terbukti pula aparatur pemerintah di Dinas Pariwisata Kota Dumai telah melaksanakan perkembangan pariwisata yang baik demi kepuasan pengunjung. Maka hal ini telah menjadi tolak ukur sekaligus spirit guna menjawab tantangan perubahan kearah perbaikan pariwisata memenuhi kebutuhan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul **“Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai”**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di kota Dumai
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Kota Dumai dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi dinas Pariwisata Kota Dumai dalam pengembangan objek Pariwisata di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Dinas Pariwisata Kota Dumai dalam pengembangan objek Pariwisata di Kota Dumai.

### **2. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dan dapat di gunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.

- b. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan, serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori, konsep serta aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti agar mudah menjelaskan maksud dari penelitian ini, yang dapat ditemukan di dalam buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi dan lainnya yang dapat diperoleh secara tertulis maupun melalui media elektronik.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut ndraha (2015:7) di defenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemrintahan umum yang ada (Musenaf,2002:15).

Menurut Admosudirjo (2004:183), Management pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya managemen dari pada government staff work, management kepolisian, management dari pada legal drafting (penaskahan berbagi undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintahan menurut Musenaf (2002:22) adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah dan pembangunan.
- b. Pembinaan masyarakat

Secara substantif, menurut Rasyid (2001:48), tugas pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok yakni :

- a. Pelayanan
- b. Pemberdayaan
- c. Pembangunan

## **2. Konsep Pemerintahan**

Menurut syafiie (2007:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah yang berarti memiliki makna melakukan pekerjaan menyuruh antara dua pihak yakni yang memiliki wewenang yaitu pemerintah dan yang memiliki kepatuhan yakni yang di perintah.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang artinya adalah suatu badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memerintah
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadu pemerintahan, yang berarti suatu perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah tersebut.

Kemudian dikuatkan dengan teori Woodrow Wilson dalam syafie (2013:10) yang menjelaskan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi yang memiliki kekuatan bersenjata, tetapi beberapa orang yang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Sri Maulidiah (2014:1), pemerintah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberikan legitimasi atau keabsahan dalam bentuk wewenang oleh rakyat kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara sebagai factor pendukung dalam menyelenggarakan pemerintah dan memiliki empat fungsi utama yakni: fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan dan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

Menurut bastian indra (2006), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintahan memiliki kewenangan menjalankan fungsi eksekutif, legislative, kepemimpinan dan kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kordinasi antara rakyat dengan pemerintahannya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut syafiie (2010:14) pemerintahan adalah sekelompok orang yang melakukan sesuatu tindakan kordinasi atau tidak melakukan suatu tindakan kordinasi yang dilaksanakan secara baik dan benar dalam hubungan antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat maupun dengan unit atau bagian dalam suatu pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang memiliki tujuan untuk memenuhi dan melindungi tuntutan dan kebutuhan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, tuntutan yang diperintah berdasarkan posisinya seperti sedang sebagai pelanggan atau customer yang tidak berdaya dan sebagainya.

Jadi, berdasarkan definisi tentang pemerintahan yang telah dijelaskan diatas, maka dimuatkan dan disimpulkan menurut kitab suci Al-Qur'an dalam Syafiie (2013:12) yang menjelaskan bahwa pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang hal-hal buruk, dan itulah orang-orang yang beruntung.

### **3. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Budi Suoriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Taliziduhu ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan
3. Ekologi pemerintahan.
4. Filsafat dan etika pemerintahan.
5. Praktik penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **4. Konsep Inovasi**

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah model difusi dari Rogers. Menurut Rogers, penyebaran atau difusi adalah proses suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Model difusi Rogers mengemukakan tentang difusi inovasi yang dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan sebuah inovasi, misalnya teknologi baru

(Widyawan:2014). Proses adopsi inovasi menurut model difusi inovasi rogers terdiri dari lima variabel antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran, ketika pengguna mencoba suatu inovasi dan mempelajarinya.
2. Timbul minat dan pengetahuan, ketika pengguna produk kemas ulang informasi mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi produk tersebut. Dalam tahap ini terdapat lima karakteristik inovasi menurut rogers (1995) antara lain sebagai berikut:
  - a. *Relative advantage* (kegunaan relatif) adalah tingkat kelebihan suatu inovasi dibandingkan inovasi sebelumnya atau dari suatu hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Keuntungan relative biasanya di ukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relatif didapatkan oleh pengguna, maka semakin cepat pengguna akan menggunakan inovasi tersebut.
  - b. *Compability* (kecocokan) adalah tingkat kecocokan dari suatu inovasi yang muncul dilihat apakah sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang ada. Jika berlawanan dengan atau tidak sesuai dengan pengguna maka akan menyulitkan suatu inovasi untuk digunakan.
  - c. *Complexity* (kompleksitas/kerumitan) adalah tingkat kerumitan dari penggunaan suatu inovasi saat digunakan oleh pengguna dan pemahaman

pengguna tentang inovasi tersebut. Semakin mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, maka semakin cepat pengguna menggunakan inovasi tersebut.

- d. *Trialability* (percobaan) adalah tingkat suatu inovasi untuk dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Inovasi di ujicobakan pada keadaan yang sesungguhnya dan dapat menunjukkan keunggulannya agar pengguna menggunakan inovasi tersebut.
- e. *Observability* inovasi menuntut kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan secara kreatif menyelesaikan sebuah tantangan maupun masalah dengan menemukan cara, ide, dan produk (barang/jasa) baru. Kemampuan adaptif ini harus dimiliki oleh organisasi yang bersifat status quo akan sulit mengembangkan inovasi. (Suwarno,2008)

3. pembentukan perilaku, pengguna mengevaluasi inovasi dan menentukan menyukai inovasi yang ditawarkan atau tidak menyukai.

4. keputusan mencoba, pengguna mulai menggunakan produk kemas ulang informasi tersebut dalam skala kecil.

5. penerimaan atau penolakan, setelah pengguna menggunakan dan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut. Pengguna dapat memutuskan untuk menolak atau menerima inovasi tersebut sepenuhnya.

#### a. Tingkatan inovasi

Shapiro (202) dalam Rahayu Y.S,2015 : 95 secara tegas menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu *capability* (kapabilitas). Bagi organisasi yang inovatif,

seluruh aspek dari suatu kapabilitas harus dipertimbangkan inovasi dalam dimensi penambahan nilai atau *vale added*, dan kondisi kecanggihan atau *sophistication*. Pada tingkatan pertama, inovasi sebagai *event*, pada tingkatan kedua sebagai *process*, dan tingkatan ketiga sebagai *capability*.

#### **b. Kriteria Inovasi**

Dengan merujuk kepada sejumlah pemahaman mengenai inovasi, dapat disimpulkan bahwa sebuah program yang inovatif biasanya akan menjadi *best practices*. Dalam sidang umum PBB, telah merekomendasikan bahwa Best Practice digunakan oleh UN sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang didasarkan atas apa yang terjadi dilapangan.

*Best practice* memiliki tiga karakteristik yang dikutip dalam *Report of the preparatory committee for the United Nation Conference on Human Settlement* yang di presentasikan pada sidang umum PBB, yaitu :

- Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan di demonstrasikan dalam meningkatkan kaulitas kehidupan masyarakat;
- Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil.
- Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Adapun kriteria *best practices* menurut UN (dalam Sangkala,2014 : 8) terdiri atas :

1. Dampak (*impact*), sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (*partnership*), sebuah *best practice* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut:
  - a. Legilasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi.
  - b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
  - c. Kerangka intitusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab.
  - d. Efisiensi, transparan dan system manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership* dan *community empowerment*) yakni :
  - a. Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan publik.
  - b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

- a. Penerimaan dan bertanggung jawab terhadap perbedaan social dan budaya.
  - b. Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
  - c. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender quality* dan *socialinclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer (*innovation within localcontent dan transferability*).

Kemudian tipologi inovasi di sektor publik menurut Halvorsen adalah sebagai berikut :

- a. *A new or improved service* (pelayanan baru atau pelayanan yang di perbaiki), misalnya kesehatan dirumah.
- b. *Process innovation* (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk.
- c. *Administrative innovation* (inovasi administratif), misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.

- d. *System innovation* (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama dan interaksi.
- e. *Conceptual innovation* (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam *outlook*, seperti misalnya manajemen air terpadu atau *mobility leasing*.
- f. *Radical change of rationality* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah.

Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating system yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian menurut Adrian Albritton and Guido Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam *governance* maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif, dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban atas masalah-masalah lama.

- a. Inovasi institusional, yang fokusnya adalah pembaharuan lembaga yang telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaruan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga di sektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam

penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.

- b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
- c. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemeberian pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan–sentuhan inovasi terutama dalam hal *service delivery*, efesiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
- d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru *governance* (seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan *governance*, reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).

### c. Strategi Inovasi Dalam Pemerintahan

Inovasi dan analisis praktek yang sukses (dalam sangkala :2013) menunjukkan bahwa ada lima strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu :

Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Kewenangan publik seringkali mengintegrasikan

produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya penggunaan call center, email, kartu debit, e-government dan lain-lain.

1. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring layanan, akan membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru.
2. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.
3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta. Misalnya kolaborasi dengan organisasi bisnis dalam upaya mempromosikan efisiensi dan kualitas layanan administrasi publik.
4. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintahan yang inovatif harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah menyediakan forum bagi publik untuk mengekspresikan pandangannya dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil inovasi lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opininya

terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.

5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. *United Nation World Publik Sector Report* tahun 2004 mencatat penggunaan layanan berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruhan sektor publik. Kontribusi internet untuk menyederhanakan dan memperbaiki cara warga memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik. Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan transparansi dan integritas dalam administrasi publik.

Sementara menurut UNDESA, (dalam suworno : 2008 ) keharusan sektor publik berinovasi karena alasan berikut :

1. Demokratis  
Fenomena demokratis telah menyebar keseluruh dunia, melewati batas-batas, ideology dan politik bangsa-bangsa.
2. Perjanjian internasional  
Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi antar bangsa dalam rangka kerjasama.
3. *Brain drain*

Fenomena *human capital flight* yang terjadi dari Negara berkembang ke Negara maju, sehingga terjadi keseimbangan persebaran sumber daya manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara Negara maju dengan berkembang makin melebar. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi beberapa Negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas politik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini mulai menadopsi system demokrasi serta mengalami transisi. Moral pegawai negeri Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan birokrasi yang lebih baik.

#### 1. Privitasi dan *outsourcing*

Pemerintah mempunyai tiga peranan kebijakan terkait dengan inovasi yaitu :

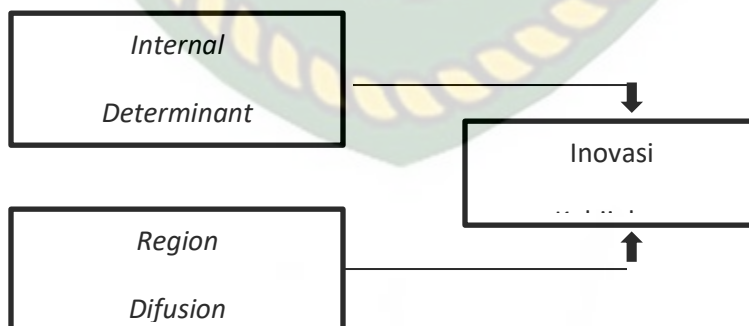
- 1) *Policy innovation* : new policy and initiatives (inovasi kebijakan)
- 2) *Innovation in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan)
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion* (kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya)

Berkenaan dengan itu berry & berry menjelaskan bahwa penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merajut pada dua determinan penting, yaitu internal determinant, dan fungsi regional diffusion. Yang dimaksud dengan internal determinant atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik

sebuah Negara menentukan keinnovation sebuah Negara.Sedangkan regional diffusion atau difusi regional kemungkinan sebuah Negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika Negara-negara tetangganya mengadopsi kebijakan tersebut.

Sebuah contoh ilustrasi dari internal determinants yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi public, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika Negara tetangga atau Negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita. Misalnya dalam hal kebijakan dibidang lalu lintas, dimalaysia diberlakukan kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan. Kebijakan ini kemudian di tiru oleh Indonesia, terutama di beberapa kota besar, dengan hasil yang diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas

Dengan demikian, inovasi terjadi karena salah satu dari dua faktor tersebut, atau terjadi juga karena dua faktor tersebut.



Dalam sebuah studi inovasi di sektor publik melalui server yang dilakukan oleh *borin dalam the challenge of innovating in government* tahun 2001 mengindikasikan bahwa:

1. 50% inovasi di sektor publik merupakan insiatif dari front line staf dan manager tingkat menengah (*middle manager*).
2. 70% inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respon krisis
3. 60% inovasi melewati batas-batas organisasional (*cut cross organizational boundaries*).
4. Inovasi hadir lebih dikarenakan oleh motivasi untuk dikenali atau dihargai (*recognition*) dan kebanggaan dari pada sekedar penghargaan *financial*.

Proses inovasi bagi organisasi dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui tahapan sebagai berikut (rogers, 2003. Hal 420):

1. *Initiation* atau perintisan

Tahapan perintisan atas fase agenda setting dan matching. Ini merupakan tahapan awal pengenakan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi

tersebut akan di aplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga bisanya dikenali adanya performance gap atau kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi.

## 2. *Implementation* atau pelaksanaan

Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implementasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinitasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses *re-invention*, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi. Pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefenisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang kemudian justru

gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi berlebihan.

Fase rutinitasi adalah fase dimana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi. Di luar sektor publik, beberapa organisasi bisnis yang dikenal sangat inovatif seperti Unilever dan Shell lebih memfokuskan diri pada *outcome*, didukung dengan budaya organisasi yang benar, *reward* dan metode yang memastikan inovasi hadir dan bermanfaat.

#### **d. Menciptakan Inovasi**

Inovasi diciptakan untuk mendapat sebuah kondisi baru yang lebih menguntungkan dengan bermodal sumber daya yang ada saat ini. Peluang munculnya inovasi dapat berasal dari kejadian yang tak terduga (*unexpected occurrence*), keganjilan (*incongruities*), *process needs*, *industry and market changes*, *demographic in changes in perception*, dan *knowledge*.

- a. Kejadian tidak terduga (*unexpected occurrence*) Kejadian yang tidak terduga menjadi peluang dan kesempatan paling mudah dalam proses munculnya inovasi. Kejadian sukses yang tidak terduga dan kegagalan yang tidak terduga menjadi sumber penting inovasi yang sama bobotnya, kenapa demikian, Karena dalam perkembangan organisasi baik privat maupun organisasi publik, tidak begitu memperdulikan, mengabaikan, dan bahkan membuang kondisi

kesuksesan yang tidak terduga dan kegagalan tidak terduga ini. Disinilah kekuatan dari sumber ini, menjadi satu daya dorong produktif untuk menghasilkan ide keterbaruan.

- b. *Incongruities* Sebuah keganjilan atau ketidakwajaran yang dihasilkan dari gap antara ekspektasi dan hasil dapat memberikan inisiatif dimana proses tersebut mendapatkan hambatan dalam implementasinya. Inovasi dapat muncul sebagai jawaban ide produktif apa untuk mengurangi kondisi tersebut terus terjadi.
- c. *Process needs* Inovasi dapat dihasilkan dari analisis proses yang berlangsung. Keterbaruan teknologi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan sebuah pelayanan atau produksi misalnya teknologi untuk mencetak surat kabar. Inovasi seperti ini dapat muncul melalui analisis proses dalam produksi di organisasi publik maupun privat.
- d. *Industry* dan perubahan pasar Sejumlah orang mempercayai bahwa industri memiliki struktur sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemiliknya. Tetapi kita perlu mengingat bahwa struktur tersebut sering berubah. Perubahan struktur dalam system industri inilah menjadi kunci masuk adanya inovasi. Inovasi muncul sebagai antitesa dari sifat pemimpin industri tradisional yang menolak untuk ikut berubah seiring perubahan tuntutan lingkungan. Inovator dapat muncul sebagai sebuah ide yang lain dari sejumlah pemimpin organisasi lainnya lakukan.

- e. Perubahan demografi Sebagai sumber peluang munculnya inovasi dari factor luar, demografi adalah faktor yang paling relabel. Jumlah kependudukan dalam suatu wilayah atau are dapat menjadi sumber inspirasi dari adanya ide-ide keterbaruan yang tranformatif. Karakteristik individu dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan suatu kebijakan. Misalnya, ledakan penduduk pada tahun tertentu disuatu Negara menghasilkan Negara yang antisipatif misalnya dengan mempersiapkan kebijakan ketenagakerjaan. Ducker (2002) menyatakan bahwa pemimpin perlu memperhatikan perubahan demografi, ”manager sudah tau itu sejak lama masalah demografis, tetapi mereka selalu percaya populasi itu statistic berubah perlahan,di abad ini bagaimanapun mereka tidak karena itu peluang inovasi memungkinkan perubahan dalam jumlah orang dan dalam distribusi usia mereka, pendidikan dan lokasi geografis yang menguntungkan dan paling tidak berisiko bagi wirausaha”.
- f. Perubahan persepsi Perubahan persepsi merupakan cara untuk menghasilkan inovasi. Dengan mengganti sudut pandang persepsi, sebuah organisasi akan mendapatkan sebuah langkah efektif dari sebelumnya. Ducker (2002) memberikan contoh perbedaan persepsi dari pengungkapan deskripsi “*the glass is half full*” dan “*the glass is half empty*”pengungkapan deskripsi tersebut memiliki arti yang sama meskipun berasal dari sudut pandang yang berbeda.
- g. Pengetahuan baru Berdasarkan sejarah, pengetahuan baru berasal dari teknologi dan ilmu pengetahuan bahkan sosial memiliki dampak yang paling

besar dalam penyusunan sebuah inovasi. Inovasi berbasis pengetahuan dapat dengan cepat populer dan berhasil meskipun tidak semua inovasi berasal dari pengetahuan penting.

## 5. Konsep Manajemen Pariwisata

Manajemen pariwisata menurut Leiper (dalam pitana dan diarta. 2009;80) adalah seperangkat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga meurujuk pada fungsi-fungsi melekat pada peran tersebut.

Selanjutnya menurut Leiper (dalam pitana dan diarta. 2009;80) fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Directing* (mengarahkan)
- c. *Organizing* (termasuk *coordinating*)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Richardon dan Fluker (dalam pitana dan diarta, 2009:86) yang harus mencangkup dalam manajemen pariwisata adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan).
- b. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional negara bersangkutan.
- c. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan

- d. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata.
- e. Menyediakan pengambilan *financial* yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Selanjutnya menurut pitana dan diarta (2009:86) tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyumbang pertumbuhan dan pendapatan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu di perlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah:

- a. Staff dari insdustry pariwisata
- b. Konsumen
- c. Investor dan developer
- d. Pemerhati dan penggiat lingkungan
- e. Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestarian budaya
- f. Masyarakat tuan rumah
- g. Pemerintah
- h. Pelaku ekonomi lokal dan nasional

Pengelolaan atau manajemen pariwisata menurut Cox (dalam pitana dan diarta, 2009:81) pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pengembangan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan spesial lokal yang mereflesikan keunikan peninggalan dan keunikan lingkungan.
- b. Persevasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi pariwisata tambahan yang mengakar pada budaya local.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Darsoprajitno (2002:406) di dunia ada dua tata manajemen yaitu manajemen adalah sekelompok wisatawan dapat ditangani secara langsung kemana saja mereka pergi berwisata. Manajemen semacam ini disebut manajemen dinamik, tetapi ada pula sekelompok wisatawan yang melakukan pelawatan wisatanya, cukup dengan mengacu pada buku petunjuk pariwisata, tanpa disertai oleh pemandu pariwisata seorangpun. Manajemen pelawatan wisata kepada sekelompok wisatawan semacam ini disebut manajemen static Dalam hal ini wisatawannya dapat bergerak

sendiri secara otomatis, sedang pada kelompok wisatawan yang melewati wisatanya ke setiap objek dan daya tarik wisata memerlukan panduan disebut pelewatan wisata manual. Menurut Darsoprajitno (2004:410) manajemen sarana pariwisata yaitu transportasi dengan jaringan penunjangnya atau lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pariwisata.

## 6. Konsep Pengembangan Pariwisata

Suwantoro (1997:87), menyatakan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang pelayanan yang berkualitas, seimbang, bertahan. Sedangkan menurut Spillane dalam (Suwantoro, 1997; 90) untuk dapat mengembangkan suatu kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima unsur yang harus di penuhi seperti di bawah ini:

- a. Objek wisata dan dayatariknya
- b. Prasarana wisata
- c. Sarana Wisata
- d. InfrastrukturWisata
- e. Masyarakat ataulingkungan

Pengembangan objek wisata menurut Pearce (dalam Suwantoro, 1997; 90) dapat di artikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan objek wisata (yoeti,2008; 17) yaitu:

- a. Tersedianya objek wisata dan daya tarikwisata
- b. Adanya fasilitas *accebility* yaitu sarana dan prasarana sehingga

memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.

- c. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di sector lainnya. Maka di dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara yang terjadi secara terus menerus, untuk menjadikan sesuatu objek tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif maupun dampak negatif, maka di perlukan perencanaan untuk menekan sekecil kemungkinan dampak negative yang di timbulkan. Spillane (1994:51-62) menjelaskan dampak positif maupun dampak negatif dari pengembangan pariwisata.

Dampak positif yang di ambil dari pengembangan pariwisata meliputi :

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan, dimana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat di gantikan dengan modal atau peralatan.
- b. Sebagai sumber devisa Negara.
- c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spitual, di isi pariwisata secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industry kearah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata di sadari dapat menjadi

dasar pembangunan regional. Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dan pariwisata.

Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan dari adanya pengembangan pariwisata meliputi :

- a. Pariwisata dan *Vulnerability* ekonomi karena di Negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka khususnya kalau Negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.
- b. Banyak kebocoran yang sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-barang impor, biaya promosi keluar negeri,tambah pengeluaran untuk warga Negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan lainnya.

Dampak positif yang di ambil dari pengembangan pariwisata meliputi :

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan, dimana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat di gantikan dengan modal atau peralatan.
- b. Sebagai sumber devisa Negara.
- c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spitual, di isi pariwisata secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industry kea rah wilayah

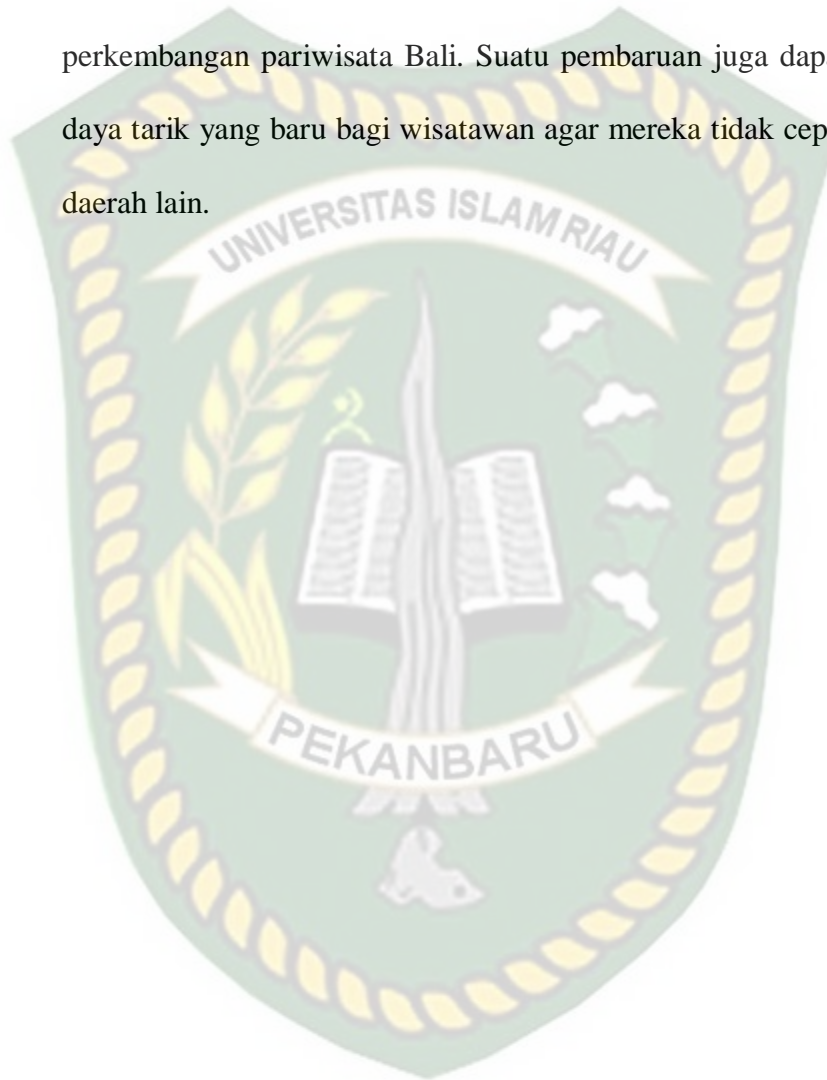
desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata di sadari dapat menjadi dasar pembangunan regional. Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dan pariwisata.

#### **7. *Best Practice* Dalam Inovasi Pengembangan Objek Pariwisata**

Seperti yang kita ketahui Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melakukan pengembangan pariwisata terbaik hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung, jumlah kunjungan bisa mencapai 2.000 orang per hari. Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki serta mengembangkan Pariwisata di Bali guna mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya :

1. Mempersiapkan beberapa program untuk meningkatkan sebaran wisatawan baik domestik maupun mancanegara di semua kabupaten/kota, termasuk juga investasi sehingga ada pemerataan kesejahteraan.
2. Dalam melakukan pengembangan pariwisata Pemerintah provinsi Bali tidak bekerja sendiri tetapi tidak terlepas dari peran masyarakat dan para pelaku pariwisata.
3. Melakukan diskusi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Para pelaku pariwisata mengenai bagaimana pariwisata Bali tetap eksis dan secara ekonomis mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Pemerintah Provinsi di Bali menekankan agar pelaku pariwisata lebih mengantisipasi perubahan

situasi sehingga dapat mengambil langkah- langkah untuk menghadapi makin ketatnya persaingan, baik dari segi infrastruktur maupun penambahan destinasi baru sehingga tidak ada kesan menoton dalam perkembangan pariwisata Bali. Suatu pembaruan juga dapat memberikan daya tarik yang baru bagi wisatawan agar mereka tidak cepat berpaling ke daerah lain.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel III.I Penelitian Terdahulu Tentang Inovasi Dinas Pariwisata Kota

### Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Kota Dumai.

Peneliti/tahun/judul	Persamaan	Perbedaan
Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul Shaleh, Minto Hadi/2015/Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal(Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan).	Sama-sama meneliti tentang pengembangan objek pariwisata, sama-sama memiliki metode penelitian yang sama.	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, teori penelitian
Riswandha Risang Aji, Retno Widodo Dwi Pramono, dan Dwita Hadi Rahmi/2018/Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah Di Provinsi Jawa Timur.	Sama-sama membahas tentang bagaimana kontribusi dinas pariwisata terhadap ekonomi di wilayah masing-masing.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian dan teori penelitian.

Superda A.Masyono Bambang  
Suhada/2015/Strategi  
Pengembangan Sektor  
Kepariwisata Di Kabupaten  
Lampung Timur.

Memiliki persamaan  
tentang pengembangan di  
sektor pariwisata

Perbedaan  
penelitian ini  
terletak pada  
lokasi penelitian  
dan metode  
penelitiannya  
yang  
menggunakan  
teori kuantitatif  
dan kualitatif.

Adam muakhor/2008/Strategi  
Pengembangan Objek Wisata  
Pantai Randusan Indah  
Kabupaten Brebes Sebagai  
Objek Wisata Unggulan.

Penelitian ini memiliki  
persamaan tentang  
bagaimana cara  
pengembangan objek  
pariwisatanya.

Perbedaan  
penelitian ini  
terdapat pada  
lokasi  
penelitian,serta  
objek wisata dan  
teori penelitiannya



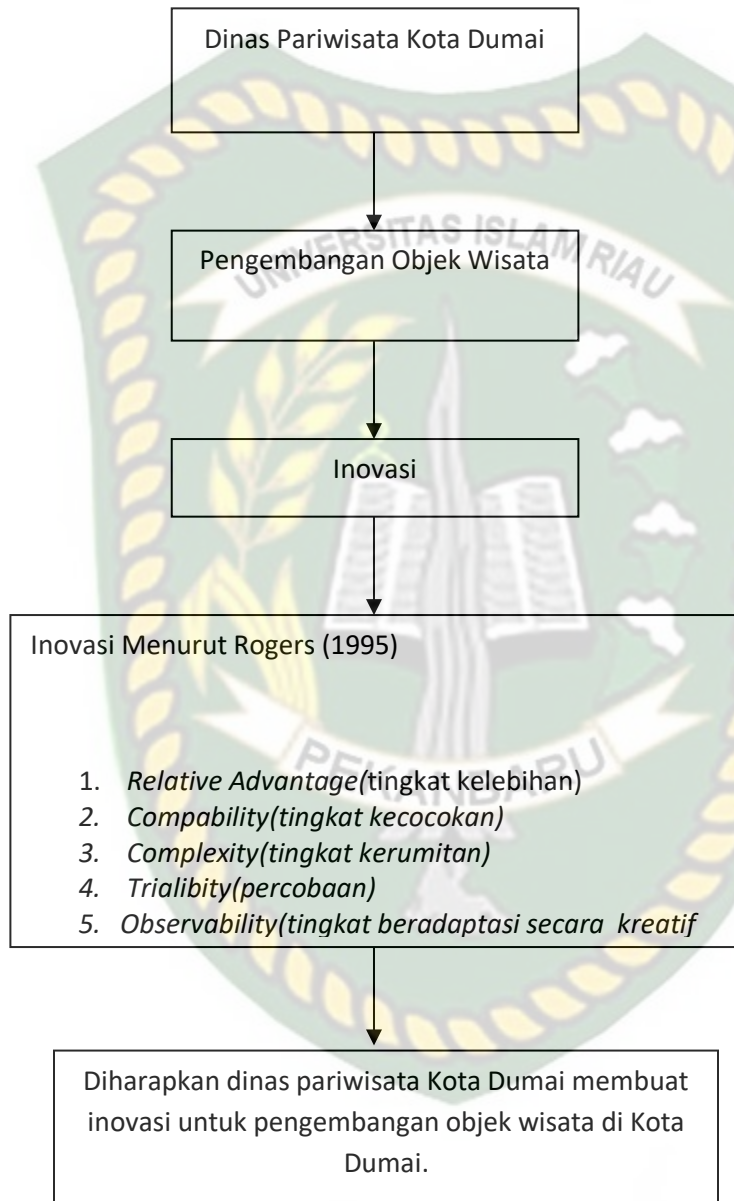
A. Reni Widyastuti/2010/Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu memiliki konsep pengembangan pariwisata tetapi berbeda dengan teorinya yang berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, teori penelitian
--	--	--

*Sumber: Olahan Penulis 2021*



### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai**



*Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020*

#### D. Konsep Operasional

**TabellII.2 Operasional Variabel Tentang Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang dasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru (rogers dalam suarni, 2008:9)	Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai	<i>Relative Advantage</i> (tingkat kelebihan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keuntungan</li> <li>2. Kenyaman</li> <li>3. Kepuasan</li> </ol>
		<i>Compability</i> (tingkat kecocokan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsisten</li> <li>2. Pengalaman Masa Lalu</li> <li>3. Kebutuhan Potensial</li> </ol>
		<i>Complexity</i> (tingkat kerumitan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman</li> <li>2. Hambatan</li> <li>3. Kemudahan</li> </ol>
		<i>Triability</i> (percobaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji coba</li> <li>2. Kemudahan</li> <li>3. Keunggulan</li> </ol>
		<i>Observability</i> (tingkat beradatasi secara kreatif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Inovasi</li> <li>2. Keuntungan Inovasi</li> <li>3. Kelebihan Inovasi</li> </ol>

### E. Operasional Variabel

Variabel utama dalam penelitian ini adalah tentang “Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai” yang dimaksudkan dalam penelitian ini indikatornya terdiri dari :

- a. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan serasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh di tegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.
- b. Konsep pemerintahan adalah menurut kitab suci Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang hal-hal buruk, dan itulah orang-orang yang beruntung.
- c. Konsep Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintah oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Konsep inovasi adalah proses suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial.
- e. *Relative Advantage* adalah tingkat kelebihan suatu inovasi dibandingkan

inovasi sebelumnya atau dari suatu hal-hal yang dilakukan sebelumnya.

- f. *Compability* adalah tingkat kecocokan dari suatu inovasi yang muncul dilihat apakah sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan yang ada.
- g. *Complexity* adalah tingkat kerumitan dari penggunaan suatu inovasi saat digunakan oleh pengguna dan pemahaman pengguna tentang inovasi tersebut.
- h. *Trialbility* adalah tingkat suatu inovasi untuk dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya.
- i. *Observability* adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara kreatif menyelesaikan sebuah tantangan maupun masalah dengan menemukan cara, ide, dan produk (barang/jasa) baru.
- j. Manajemen pariwisata menurut adalah seperangkat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga meurujuk pada fungsi-fungsi melekat pada peran tersebut.
- k. Konsep pengembangan pariwisata adalah menyatakan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang pelayanan yang berkualitas, seimbang, bertahan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Kota Dumai”. Menurut Meleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pantai Marina Indah Puak Kota Dumai, alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan menerapkan inovasi dibidang Pariwisata dan menjadi fokus penulis dalam mengumpulkan sumber data sesuai dengan judul yang diangkat.

##### C. *Key informan* dan Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005:3) *key informan* adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Informan menurut Moelong (2005:3) adalah orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada penulis tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung mengenai penelitian tersebut, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *key informan* merupakan orang yang paling mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Promosi Objek Wisata

Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pariwisata
2. Kepala Seksi pengawasan Objek Wisata Dari Dinas Pariwisata Kota Dumai
3. Kepala Seksi Sarana dan prasarana Pariwisata Dari Dinas Pariwisata Kota dumai
4. Pengunjung Pantai Marina Indah Puak Kota Dumai.

#### **D. Teknik Penetapan Informan**

Penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk penetapan informan Karena jumlah pengunjung setiap harinya tidak tetap tidak memungkinkan penulis untuk menemui responden yang sama, maka penulis menggunakan *Purpposive sampling* dalam menentukan siapa saja yang menjadi responden. *Purpposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di peroleh nantinya lebih representatif. (Sugiyono:2010).

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Menurut Sutabri (2012:2) data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-

file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

## 2. Data sekunder

Pengertian data sekunder menurut (Uma sekaran,2011), adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1. Teknik Pengamatan/Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

#### 2. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg Dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

#### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita tera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kulitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena – fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Dumai

##### 1. Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau ditinjau dari letak geografis. Kota Dumai terletak antara 101o23'37" – 101o8'13" Bujur Timur dan 1o23'23" – 1o24'23" Lintang Utara dengan Luas Wilayah 1.727,38 Km<sup>2</sup>. Kota Dumai memiliki Tujuh (7) Kecamatan dan 40 Kelurahan. Batas Administratif Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727,38 Km<sup>2</sup>. Sebelumnya Kota Dumai merupakan Kota terluas Nomor 2 (dua) di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan terbentuk Kabupaten Wasiu, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah. Dumai adalah sebuah dusun kecil di Pesisir Timur Sumatera. Nama Dumai menurut cerita Rakyat tentang putri Tujuh, berasal dari Kota di Lubuk dan Umai (Sejenis Binatang Landak) yang mendiami lubuk tersebut.

Karena diucapkan cepat, lama kelamaan kata- kata tersebut bertaut menjadi D' Umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, diresmikan sebagai Kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa dengan jumlah penduduknya 15.699 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83, 85 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Saat ini Kota Dumai sebagai Kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas International. Dulu Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di Pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal- kapal tangka minyak raksasa setiap harinya singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang- kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadi Kota Dumai malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Pada era 1930-an. Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum Romusha (Pekerja Paksa Zaman Penjajahan) dari Jawa. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

1. Tahun 1945- 1959, Status Dumai tercatat sebagai Desa.
2. Tahun 1959- 1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupal.

3. Tahun 1963- 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewadanan.
4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah menjadi Kota Administratif (merupakan kota Administratif pertama di Sumatera dan ke- 11 di Indonesia) dibawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah menjadi Kota Madya sehingga menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Maka jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April dijadikan hari Ulang Tahun Kota Dumai.
6. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrative pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek tentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayananserta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya pembangunan pemerintahan.
7. Pengelolaan Proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan

pengembangan ekonomi. Di dalam sejarah Kota Dumai pernah menjadi Kota paling luas Nomor 2 (Dua) di Indonesia setelah Manokwari di Papua.

Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari pecah dan kemudian terbentuk Kabupaten Wasior, maka Kota Dumai menjadi Kota Terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil didaerah Pesisir Timur Pulau, Kota Dumai juga dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri adalah singkatan dari ( Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) Berseri (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).

## **2. Topografi**

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023-1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"-101028'13 Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara. Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis sebelah Timur. Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim Tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33°C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

## **3. Pemerintahan**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 16 Tahun 1999, Dumai Barat merupakan wilayah administratif Kota Dumai yang memiliki 4 Kelurahan dan

mempunyai jumlah penduduk 47.364 jiwa. Pada setiap kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah, dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh beberapa stafnya dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan pemerintahan.

#### **4. Penduduk**

Masalah penduduk dikecamatan Dumai Barat sama halnya dengan Daerah lain. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang kurang terkendali, sulit tercapai Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang harus ditingkatkan. Penduduk di Kecamatan Dumai Barat pada tahun 2019 berjumlah 47.364 jiwa, yang terdiri dari 21.269 jiwa penduduk laki-laki dan 21.095 jiwa penduduk perempuan.

#### **5. Sosial**

##### **a. Pendidikan**

Berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, semakin maju pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian yang lebih untuk dunia pendidikan.

#### b. Pertanian dan Perkebunan

Tanam pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan sayur- sayuran dan buah- buahan diperoleh dari Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan Kota Dumai. Sedangkan perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Jenis tanaman pangan dan perkebunan yang ada di Kota Dumai yaitu Padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman yang sangat potensial di Daerah ini adalah kelapa Sawit. Sungai Sembilan merupakan penghasil sawit terbesar, sedangkan untuk penghasil padi terbesar juga terdapat pada Kecamatan Sungai Sembilan.

#### c. Peternakan

Pembangunan sub sector peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat di samping meningkatkan pendapatan peternakan. Di kecamatan Dumai Barat terdapat ternak sapi dan kambing sekitar 1.124 ekor dan Kambing 2.006 ekor.

#### d. Industri

Kota Dumai terkenal dengan sebutan Kota Tambang Minyak, bermula dari serikat Indonesia standar oil California (Socal) atau PT. CPI menetapkan kawasan pantai Dumai sebagai alternatif pelabuhan untuk mengembangkan industrinya. Hal ini berdampak positif terbukti dari tahun

ke tahun kawasan ini berkembang pesat. Perkembangan berbagai bidang industry ini juga didukung dengan adanya beberapa kawasan industry yang disebut dengan Kawasan Industry Dumai (KID) yaitu terdiri dari kawasan industry pelintung seluas 5.008 hektar, kawasan industry Lubuk Gaung yang terdapat disungai sembilang seluas 2.158 hektar, kawasan industri bukit kapur di Kecamatan Bukit Kapur seluas 115 hektar dan kawasan industry Terpadu Dock Yard seluas 300 hektar.

## **B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai**

### **1. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai**

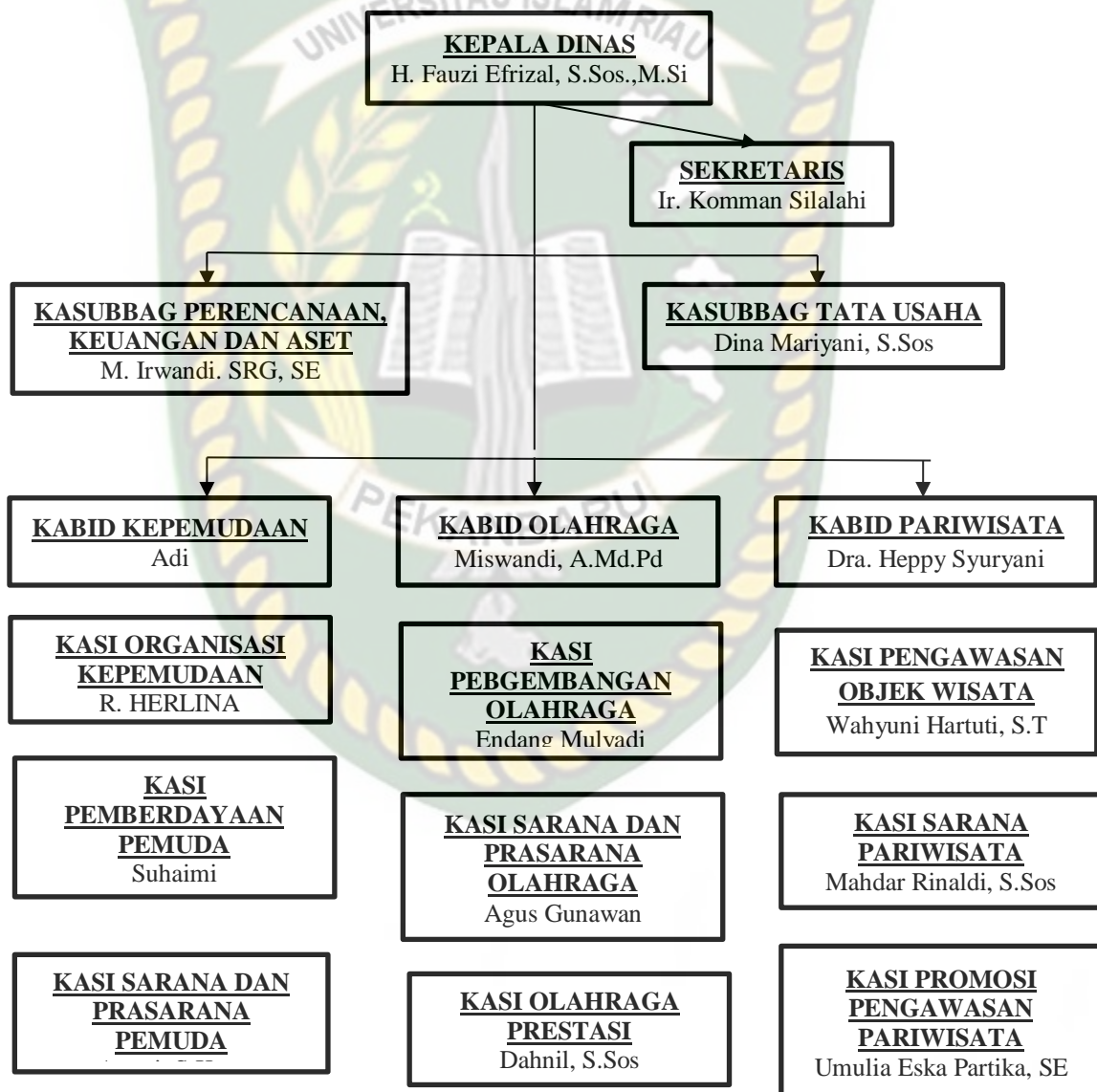
Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Dasar pertimbangan dibentuknya Dinas tersebut adalah Undang- undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melakukan ketentuan pasal 11 Undang- undang tersebut dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang ada prinsipnya sebagai arah yang jelas dalam menata organisasi Daerah kota Dumai. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah (Perda)

tersebut dibentuk, yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2005 oleh Walikota Dumai.

## 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pariwisata

Gambar IV. I

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai



Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

##### 1. Identifikasi Informan

Pada bab ini penulis akan memaparkan dengan pembahasan mengenai identitas informan yang terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Adapun informan kunci dari penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Dumai yang masing-masing 1 orang dan masyarakat yang berkunjung ke objek wisata tersebut.

##### 2. Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berpikir seseorang dan juga pengalaman dalam bekerja dalam menentukan hal apa yang semestisnya dilakukan dalam hidup nya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun tingkatan umur dari seluruh informan yaitu, informan yang berumur diatas dua puluh tahun. Dari data diatas, diketahui informan tersebut sudah biasa memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

### 3. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka informan berjenis 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

### 4. Tingkat Pendidikan

Melalui tingkat pendidikan yang dilakukan secara dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung dapat mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan, dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat kemampuan, keahlian, wawasan dan pola pikir seseorang tersebut.

Adapun tingkat Pendidikan dari seluruh informan ialah, informan yang berlatar belakang Strata (S1) berjumlah 4 orang. Dilihat dari komposisi tingkat Pendidikan setiap informan memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda-beda sehingga dapat menguatkan narasumber yang lebih tepat, akurat dan jelas.

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Bidang Pariwisata	S1
2	Kepala Seksi Pengawasan	S1
3	Kepala Seksi Promosi	S1
4	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	S1
5	Pengunjung Pantai Marina Indah Puak	SMA

### **B. Inovasi Dinas Pariwisata Kota Dumai Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Kota Dumai**

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informasi yang berasal dari Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Seksi Pengawasan objek pariwisata, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata dan Kepala Seksi Promosi Pariwisata. Penulis melaksanakan wawancara dengan indikator sebagai berikut. :

1. *Relative advantage* (tingkat kelebihan suatu inovasi)
2. *Compability* (tingkat kecocokan suatu inovasi)
3. *Complexity* (tingkat kerumitan suatu inovasi)
4. *Triability* (percobaan)
5. *Observability* (observasi)

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu per satu dari setiap penelitian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat dipahami sebagai berikut:

**A. *Relative Advantage*** (tingkat kelebihan suatu inovasi)

Menurut Rogers (1995) relative advantage adalah tingkat kelebihan suatu inovasi dibandingkan inovasi sebelumnya atau dari suatu hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Keuntungan relative biasanya diukur dari segi ekonomi, sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relative yang didapatkan oleh pengguna, maka semakin cepat pengguna akan menggunakan inovasi tersebut.

**1. Keuntungan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasi promosi objek wisata ibukota Pekanbaru berikut hasil kutipan wawancaranya :

*“untuk satu tahun 2018-2019 lebih kurang Rp.90.100.000 sebelum pandemic covid 19 ini terjadi.”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibukota Pekanbaru pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat di analisis bahwa keuntungan yang didapatkan oleh dinas pariwisata sebelum pandemi digunakan untuk pengembangan objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya :

*“dan itu berdasarkan Mou kesepakatan antara dinas pariwisata dengan pihak pengelola atau investor yang mengelola objek wisata”.*(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa untuk mengelolal objek wisata dinas pariwisata membutuhkan investor.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dinas pariwisata sudah memiliki anggaran untuk mengembangkan objek pariwisata pantai puak tapi terhalanag oleh pandemic di karenakan anggaran yang seharusnya untuk mengelola objek wisata dialihkan untuk kesehatan dan dinas pariwisata juga sudah melaukan mou dengan investor untuk mengelola objek wisata. Selain itu dikarenakan pandemi covid 19 obyek wisata pantai puak tidak digunakan sebagaimana mestinya.

## **2. Kepuasan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis denganKasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaki berikut hasil kutipan wawancaranya :

*“pembangunan sarana dan prasarana itu dana yang di berikan dari DAK (dana alokasi khusus), APBN (anggaran pendapatan belanja negara dan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)”.* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya anggaran dalam sarana dan prasarana yang diberikan dalam pengelolaan obyek wisata pantai

puak bnerasal dari dana alokasi khusus, anggaran pendapatan belanja negara dan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya :

*“pembangunan dan penambahan area bermain anak-anak panggung, Mushola, wc dan kantor TIC”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa kepuasan dalam pengembangan objek wisata ini sudah berkembang dan akan terus di tingkatkan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan dinas pariwisata sudah melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti area bermain anak-anak, panggung, mushola, wc, dan kantor pusat TIC (telekomunikasi informasi center) melalui dana alokasikhusus (DAK), anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

### **3. Kenyamanan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancara nya :

*“fasilitas sarana dan prasarana pembuatan gazebo, permainan anak-anak, panggung, mushola, papinblok, pondok-pondok kecil ditambahkan, kantor TIC pusat informasi”*. (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya :

*“terdapat gazebo, permainan anak-anak, panggung, mushola, sudah di papinblok, pondok-pondok kecil di tambahkan, kantor TIC pusat informasi”*.(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaki berikut hasil kutipan wawancaranya :

*“tempat spot-spot foto dengan panorama alam pantai dan dengan adanya Tulisan besar pantai puak”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaqi pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya :

*“tempat spot-spot foto dengan panorama alam pantai”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

*“menurut saya masih kurang karena terdapat sarana dan prasarana yang sudah mulai rusak serta kebersihan yang tidak terawatt seperti banyak nya sampah yang berserakan dilokasi pantai pua kini”*.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada objek wisata pantai puak sudah lengkap akan tetapi kurang nya kesadaran perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaqi berikut hasil kutipan wawancara nya :

*“melakukan promosi dengan media sosial bekerjasama dengan anak-anak muda yang di berikan nama genpi, kominfo dan media sosial pemerintah lainnya” (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaki pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya :

*”melakukan promosi dengan media sosial bekerjasama dengan anak-anak muda yang diberikan nama genpi, kominfo dan media social pemerintahlainya”(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, dinas pariwisata akan melaksanakan inovasi yang berupa kenyamanan pengunjung agar pengunjung tertarik kembali mengunjungi objek wisata tersebut dan dinas pariwisata akan melakukan promosi agar wisatawan kembali mengunjungi objek wisata meskipun dalam kondisi pandemic.

Berdasarkan analisis dan hasil observasi yang penulis lakukan bahwasanya dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat sudah disediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, namun masih kurangnya perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Sedangkan promosi yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata pantai puak melalui media sosial dengan bekerja sama dengan anak-anak muda didaerah setempat.

#### **B. *Compability***(tingkat kecocokan suatu inovasi)

Adalah tingkat kecocokan dari suatu inovasi yang muncul dilihat apakah sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan yang ada.

### 1. Konsisten

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancara nya :

*Melakukan sosialisasi serta pelatihan” melalui dana dak non fisik jadi kita melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelaku” usaha yang ada di kota dumai usaha wisata, usaha kuliner, usaha rumah makan”(wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*Kita ada juga pelatihan sadar wisata kita lakukan pada tahun 2018-2019 karna ada anggarannya yang ada di kota dumai.” (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancara nya :

*Banyak, Seperti masyarakat setempat belum bisa sinkron terhadap pemerintah dan melihat sadar wisata nya masih kurang, ” (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya:

*Pasti ada, sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah mungkin ya lahan mereka tiba-tiba di kelola oleh pemerintah, tetapi sejauh ini pantai itu belum ada pengelola nya yang resmi tapi sekarang masyarakat setempat sudah mengambil pungut disana atau pungli dan itu salah satu kendala dan permasalahan di dinas pariwisata. (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibuyeni pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata untuk pengembangan objek pariwisata di pantai puak.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis dilapangan bahwasannya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan masih kurangnya maksimalnya promosi yang dilaksanakan oleh dinas oleh sebab itu terdapat ketidak sinkron antara pemerintah dengan masyarakat mengenai objek wisata.

## **2. Pengalaman**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibuyeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“kita sudah memberikan surat dan melakukan teguran keras dan mungkin akan melibatkan aparat kepolisian karna jatuhnya sebagai pungli.” (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibuyeni pada tanggal 31 maret 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibuyeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“ada, Cuma itu jatuhnya karna tidak ada pengelola lalu masyarakat mengambil uang masuk pantai sementara uang tersebut tidak di setorkan ke*

*daerah.*” .(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa objek wisata ini rendahnya kesadaran dinas dalam pengelolaan objek wisata ini maka menimbulkan kegiatan pungutan liar yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena objek wisata ini juga milik pemerintah.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa masih rendah nya kesadaran pemerintah setempat terutama dinas yang mengelola objek wisata ini maka menimbulkan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat terlebih kegiatan yang mereka lakukan tidak mendapat persetujuan dari dinas yang mengelola dan uang yang mereka dapat pun tidak di setorkan ke pemerintah terutama dinas yang mengelola.

### **3. Kebutuhan potensial**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“ada. kita juga mau memajukan usaha-usaha ekonomi kreative masyarakat setempat dengan membuat makanan khas sendiri. Inovasi kita lebih ke mempromosikan ciri khas makanan atau kuliner seperti dodol nenas, dodol ubi, mie sagu, keripik dumai lebih ke ekonomi kreative.” .”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“ada. Jadi kita tu ingin ada wisata air, dulu pernah ada tapi kita masih terbentur masalah izin pengelolanya itu masih banyak karna kita masih proses pengembangan dulu itu masih sepi sekarang udah mulai ramai semenjak di bukanya jalan tol jadi kita harus cepat.”*(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat di analisis bahwa sudah membuat inovasi dalam menaikkan citra pariwisata pantai puak dan dinas pariwisata akan menjalankan inovasi tersebut, tinggal menunggu hasilnya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dinas pariwisata sudah membuat beberapa inovasi dan lebih memfokuskan kepada makanan khas daerah, atau lebih ke ekonomi kreatif masyarakatnya.

### **C. *Complexity***(tingkat kerumitan suatu inovasi)

Adalah tingkat kerumitan dari penggunaan suatu inovasi saat di gunakan oleh pengguna dan pemahaman pengguna tentang inovasi yang di lakukan.

#### **1. Pemahaman**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibueska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“ada melalui media sosial dan dalam bentuk pelatihan tetapi karena korona tidak adanya pelatihan jadi melalui promosi saja.”* . (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“kita juga kadang melakukan promosi di lapangan kemasyarakatan setempat”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata pantai puak yaitu berupa gencarnya melakukan promosi.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dinas pariwisata kota dumai hanya melakukan promosi melalui media sosial saja dikarenakan pandemic.

## **2. Kemudahan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaki berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“sekarang kita menyusun konsep karna sebelum kita melakukan sebuah pergerakan inovasi harus memiliki konsep yang kuat”.* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafu miyaki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“setelah itu rencana kerja dan setelah itu kuatkan badan hokum nya. Dapat anggaran baru kita laksanakan.”*(wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di analisis bahwa dinas pariwisata sedang menyusun konsep dan beberapa rencana kerja agar dapat mengembangkan objek wisata pantai puak dan dapat dilaksanakan ketika anggaran itu sudah ada.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata sudah memiliki konsep untuk melakukan pengembangan objek wisata pantai puak tinggal menunggu anggaran saja agar dapat dilaksanakan.

### 3. Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“hambatan tetap di anggaran karna semenjak covid anggaran di pindah ke covid semenjak 2 tahun ini di alihkan ke kesehatan”*. (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“hambatan tetap pada anggaran yang minim jadi sulit untuk melakukan kegiatan.”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat di analisis bahwa masih terdapat hambatan pada dana anggaran di tambah lagi dalam keadaan pandemic anggaran yang seharusnya untuk pengembangan wisata di alokasikan ke kesehatan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata masih mengalami hambatan soal anggaran, oleh karena itu dinas pariwisata mengalami kesulitan untuk mengembangkan objek wisata pantai puak.

#### **D. Trialability**(percobaan suatu inovasi)

Adalah tingkat suatu inovasi untuk di coba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya.

### 1. Uji coba

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaki berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“yang sudah di buat pembangunan sarana dan prasarana karena dulu masih kurang karna dulu hanya tanah lapang saja”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“beberapa tulisan besar beserta gazebo di situlah pihak pengelola bekerjasama dengan masyarakat setempat diajak berjualan disana itu antara kesepakatan merekalah”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat di analisis bahwa inovasi yang akan dilakukan oleh dinas yaitu aksesibilitas seperti jalan, amenitas kenyamanan wisatawan dan promosi.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata sudah melakukan beberapa inovasi seperti penambahan sarana dan prasarana agar menjadi daya Tarik pengunjung.

### 2. Keunggulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“sekarang perkembangannya karna bentuknya fisik karna tidak ada pengelola jadi tidak terawatt tapi masi bagus paling pada segi kebersihannya dan segala macamnya”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“ya perkembangan nya karna kalau ada investor nya yang mengelola pantai tersebut pasti bagus sampe kebersihan nya bertanggung jawab tapi kita tetap mengawasi kalau ada yang rusak akan di perbaiki.”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat di analisis bahwa dinas sudah mengembangkan program inovasi untuk pengembangan objek wisata pantai puak.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata sudah melakukan pengembangan terhadap objek wisata pantai puak dengan beberapa penambahan sarana dan prasarana yang sudah di jalan kan hanya saja pandangan dari beberapa masyarakat masih banyak kendala-kendala dalam pengembangan inovasi tersebut.

#### ***E. Observability***(observasi)

Adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara kreatif menyelesaikan sebuah tantangan maupun masalah dengan menemukan cara, ide, dan produk barang/jasabaru.

### 1. Hasil dari inovasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaiki berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“allhamdulillah hasilnya sangat memberikan hal positif bagi kita karna banyak kemaren setelah kita bangun ,banyak yang menyewa pantai kita misalnya ada kegiatan family gathering dan acara lainnya izin kepariwisata untuk memakai pondok-pondok dan panggung lalu di berikan rekomendasi. Dan itu sebelum pandemic.”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaiki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*“hasilnya bisa menambah daya Tarik pengunjung agar datang ke pantai puak ini”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa hasil dari inovasi memberikan dampak positif bagi pariwisata daerah kotadumai.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata sudah memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat setempat, banyak pengunjung yang datang dan menyewa tempat yang sudah di sediakan tetapi itu sebelum pandemic saat ini.

## 2. Keuntungan inovasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaki berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“memajukan ekonomi masyarakat setempat yang berjualan disana yaitu kan masuk PAD juga karna mereka kan menyewa ada aturan nya yang berlaku”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eskafumiyaki pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancara nya:

*”keuntungannya dapat membuat masyarakat sekitar untuk berjualan disana dan bisa menambah pemasukan ekonomi masyarakat disana serta menjadi pemasukan juga ke daerah karna ada pajak sesuai aturan nya”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat di analisis bahwa keuntungan dari penerapan inovasi ini menambah pemasukan pendapatan asli daerah bidang pariwisata.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa dinas pariwisata telah memberikan keuntungan terhadap masyarakat sekitaran objek wisata tersebut seperti dapat berjualan di area tersebut.

## 3. Kelebihan inovasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaki berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“kelebihannya menaikkan atau membantu ekonomi masyarakat sekitar dan kekurangannya, kurangnya tingkat sadar wisata masyarakat sekitar dan kita pun juga dalam bekerja masih ada kurangnya karena tidak ada yang membuat ciri khas yang menonjol pada pantai ini dan ini belum ada karena jatuhnya pada anggaran juga.”* (wawancara dengan kasi promosi objek wisata ibu eska fumiyaqi pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi pengawasan objek wisata ibu yeni berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“kelebihannya meningkatkan sarana dan prasarana jalan di lokasi tersebut karena yang dulunya kurang bagus sekarang sudah baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan kekurangannya kurang perhatian dari masyarakat tentang sadar wisata dan kelestarian tentang menjaga pantai tersebut”* (wawancara dengan kasi pengawasan objek wisata ibu yeni pada tanggal 31 maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa kelebihan dari penerapan inovasi sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan kekurangannya hanya terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian wisata di pantaipuak.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa dinas pariwisata telah memberikan kelebihan terhadap inovasi yang sudah dibuat tetapi masih ada saja masyarakat yang kurang sadar akan pelestarian objek wisata pantai puak dan sadar akan pariwisata.

### **C. Faktor penghambat inovasi dalam pengembangan objek pariwisata di kota dumai**

Berdasarkan yang penulis lakukan di temukan faktor penghambat dalam inovasi dinas pariwisata kota dumai dalam pengembangan objek pariwisata di kota dumai yaitu :

**a) Permasalahan anggaran**

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dumai di rasa masih kurang untuk pengembangan pariwisata di kota dumai. Permasalahan ini menyulitkan inovasi pengembangan pariwisata di kota dumai. Hal ini di karenakan pemerintah kota dumai mengutamakan program-program yang lebih penting untuk di danai.

**b) Banyaknya investor yang tidak sadar akan lingkungan**

Banyaknya investor yang tidak sadar akan lingkungan ternyata membawa dampak yang sangat besar sehingga terjadi degradasi lingkungan di kota dumai, hal tersebut di akibatkan oleh para investor yang berinvestasi di sektor perhotelan dan objek wisata lainnya.

**c) Kurangnya sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah**

Masyarakat setempat masi kurang sadar wisata dan sadar lingkungan terhadap wisata objek wisata pantai puak terlihat dari masi adanya masyarakat yang tidak menjaga kebersihan jika berkunjung ke objek wisata pantai puak dan masi ada masyarakat yang mengambil pungli yang dimana pungutan tersebut tidak didasarkan atas persetujuan dari dinas pariwisata kota dumai.

**d) Kurangnya promosi yang dilakukan terhadap objek wisata pantai puak**

Masi kurang nya promosi yang dilakukan pemerintah daerah kota dumai terhadap objek wisata pantai puak ini baik dari media sosial ataupun website, sehingga tidak banyak di ketahui oleh semua masyarakat kota dumai. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam melestarikan wisata pantai puak di Kota Dumai.



## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan analisis hasil penelitian tentang inovasi dinas pariwisata kota Dumai dalam pengembangan objek pariwisata kota Dumai, penulis menarik kesimpulan bahwa inovasi dinas pariwisata kota Dumai dalam pengembangan objek pariwisata kota Dumai masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam ikut serta memberikan perhatian kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam proses pengembangan wisata pantai puak.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang terawat serta, akses menuju wisata pantai puak yang masih cukup jauh.
3. Masyarakat kurang mengetahui pihak apa saja yang ikut serta dalam pengembangan wisata pantai puak, masyarakat hanya mengetahui secara umum, sedangkan banyak pihak-pihak lain yang ikut serta dalam pengembangan objek wisata pantai puak.

4. Pemerintah dan masyarakat saling bertolak belakang tentang kendala pengembangan objek wisata pantai puak. Pemerintah mengatakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wisata pantai puak sehingga menghambat pengembangan wisata pantai puak. Sedangkan masyarakat mengatakan pemerintah kurang memperhatikan wisata pantai puak, kurang perhatian dalam merawat sarana dan prasarana, dan akses menuju pantai puak.
5. Masih banyaknya kendala dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya kurang postingan-postingan yang terbaru dari wisata pantai puak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hal diatas, maka inovasi dinas pariwisata kota dumai dalam pengembangan objek pariwisata di kota dumai penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih serius lagi dalam pengembangan wisata pantai puak sehingga akan menaikkan citra pariwisata pantai puak.
2. Dengan penelitian ini, semoga pemerintah daerah kota dumai dan masyarakat bisa Bersama-sama bekerja sama dalam pengembangan wisata pantai puak.
3. Diharapkan sarana dan prasarana yang ada di wisata pantai puak ini perlu di tingkatkan lebih baik.

4. Diharapkan situs web atau media sosial lainnya tentang wisata pantai puak bisa segera di posting event-event baru sehingga menarik perhatian dari masyarakat dalam dan luar daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ancok,j.2013. *Outbond management training aplikasi ilmuperilaku dalam pengembangan sumberdaya manusia*, edisirevisi. Yogyakarta: UII Pres
- Azhar, Susanto. 2010. *Sistem Informasi1, Pendekatan Normal Praktiuka Penyusunan Metode dan Prosedur, Edisi 5*, Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, indra 2006. *System akuntasisektorpublik*. Jakarta:Erlangga
- Damanik, Janiantondan Helmut F. Weber. 2006 *Perencanaan Ekowisata: dari teori ke aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan publik: teor idan proses*. Yogyakarta:Media Pressindo
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kebijakanpublik :teoridan proses*. Yogyakarta:Media Press(Anggota IKAPI)
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning an Integrated Sustainable Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Inskeep, Edward. 1991. *Komponen Perencanaan/Pengembangan Pariwisata*
- George R.Terry,2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik: pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung

- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho Riant dan R. Wihantoro Randy, 2006, *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, PT.Alex Media Komputindo. Jakarta
- Wahyudi, Nugroho. 2008. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*. Edisi 3. Jakarta: EGC, 2008: 76-7.
- Rahayu, ami. 2013. *Manajemen perubahan dan inovasi*. Lembaga penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta.
- Rogers, E.M (1995), "*Diffusion of Innovations*," 4 th ed. Free Press, New York
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya :Capiya.
- Sangkala. 2014. *Innovative Governance :Konsep dan aplikasi*. Surabaya. Capiya Publishing.
- Suwarno, Y. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Suwantoro. 1997. *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: penerbit andi. Systematic linkange.Gramedia: Jakarta
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Teori, Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

## Jurnal

Santosa, E.D.A.I. (2015). *Pengembangan objek pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal*. Jurnal administrasi publik, 3(1), 89-95.

Aji, Riswandha Risang, Retno Widodo Dwi Pramono, and Dwita Hadi Rahmi. "kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi wilayah di provinsi jawa timur". Jurnal plano earth 3.2(2018): 280726

Masyono, superda., and Bambang Suhada. "strategi pengembangan sektor kepariwisataan di kabupaten lampung timur". DERIVATIF: jurnal manajemen 9.1 (2015).

Muakhor, adam. *Strategi pengembangan objek wisata pantai randu sanga indah kabupaten brebes sebagai objek wisata unggulan*. Diss. Universitas Diponegoro, 2008.

Widyaastuti, A Reni. "pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan." *Jurnalekosains* 2.3 (2010):69-82.

## Regulasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Kota Dumai No 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.